

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan *Good governance* dan kualitas laporan keuangan. Sementara itu, yang menjadi Subjek dari penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi tujuan serta menemukan hasil atas topik masalah yang ada. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019).

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode penelitian yang menggambarkan situasi yang terjadi pada masa sekarang, dimana data yang dikumpulkan diolah dan dianalisa kemudian dibuat kesimpulan.

Menurut Nugroho, (2011) analisis deskriptif merupakan analisis yang mengenai data diri responden, yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner, kemudian data tersebut diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan, selanjutnya dihitung persentasenya.

3.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

3.3.1 Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2015).

3.3.1.1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001), Sistem akuntansi keuangan secara sederhana adalah suatu sistem

Didah Nurjanah, 2022

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT)

Universitan Pendidikan Indonesia | repositori.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (As Syifa Nurillah, 2014).

Instrumen/kuesioner untuk mengukur variabel Penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah, Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan Kualitas Laporan keuangan mengacu pada kuesioner yang dipakai dalam penelitian Siska Yulia Defitri (2018). Pengukuran instrument menggunakan skala likert, yang mana semakin besar skor menunjukkan penerapan SAKD semakin baik dan semakin kecil skor menunjukkan penerapan SAKD semakin buruk.

3.3.1.2. Good governance

Governance sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi *Governance* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrative dalam pengelolaan Negara (Mardiasmo, 2013).

Instrumen yang digunakan dalam bentuk kuesioner mengacu pada penelitian Hilda Sri Hastuti (2017). Pengukuran instrument menggunakan skala likert, yang mana semakin besar skor menunjukkan penerapan *Good governance* semakin baik, dan semakin kecil skor menunjukkan penerapan *Good governance* semakin buruk.

3.3.2 Variabel Terikat (Dependen Variable)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015)

3.3.2.1. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Menurut B. Supriyadi, DKK, (2017) mendefinisikan laporan keuangan pemerintah daerah yakni salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja untuk dapat dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Instrumen yang digunakan dalam bentuk kuesioner mengacu pada penelitian Siska Yuia Defitri (2018). Pengukuran instrument menggunakan skala likert, yang mana semakin besar skor menunjukkan kualitas laporan keuangan semakin baik dan semakin kecil skor menunjukkan penerapan *Good governance* semakin buruk.

3.3.3 Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan batasan dari sebuah pengertian mengenai tentang variabel dependen dan juga variabel independen yang didalamnya sudah mengandung indikator dan dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini akan menjelaskan dengan tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

No.	Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala	Nomor Kuesioner
1.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X ₁	Pencatatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Prosedur pencatatan transaksi sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum	Ordinal	1
			Pencatatan yang digunakan efektif.	Ordinal	2
			Relevan dengan fakta/keadaan keuangan ada.	Ordinal	3
			Dilaksanakan tanpa kesalahan atau penyimpangan.	Ordinal	4
			Menimbulkan dampak yang baik bagi instansi.	Ordinal	5
		Penggolongan dan Pengikhtisaran Sistem Akuntansi	Dilakukan identifikasi/ pengklasifikasian.	Ordinal	6
			Penjurnalan dilakukan sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan pemerintah.	Ordinal	7

No.	Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala	Nomor Kuesioner
		Keuangan Daerah	Pengklasifikasian transaksi dilaksanakan secara tepat dan benar	Ordinal	8
		Pelaporan Sistem Akuntansi	Dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya.	Ordinal	9
			Buku laporan yang dibuat sesuai prosedur yang berlaku.	Ordinal	10
			Buku laporan yang dibuat telah relevan.	Ordinal	11
			Dilaksanakan dengan benar tanpa penyimpangan.	Ordinal	12
2.	<i>Good governance</i> X ₂	Participation (partisipasi)	Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan	Ordinal	1
		Rule of Law	Kerangka hukum yang adil dilakukan tanpa pandang bulu	Ordinal	2
		Transparency (Transparansi)	Adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan	Ordinal	3
			Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah	Ordinal	4
		Responsiveness (Responsive)	Lembaga publik cepat dan tanggap melayani stakeholder	Ordinal	5
		Consensus Orientation	Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas	Ordinal	6
		Equity	Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan	Ordinal	7
		Efficiency dan effectiveness	Meminimalkan input dan memaksimalkan output (penggunaan sumber daya finansial secara maksimal)	Ordinal	8
		Accountability (Akuntabilitas)	Proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar	Ordinal	9
		Strategic Vision	Kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah	Ordinal	10

No.	Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala	Nomor Kuesioner
			sesuai dengan visi dan misi organisasi.		
3.	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Relevan	Dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu.	Ordinal	1
			Mampu memprediksi masa yang akan datang.	Ordinal	2
			Penerbitan laporan keuangan tepat waktu.	Ordinal	3
			Mencakup semua informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.	Ordinal	4
		Andal	Menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai dengan transaksi dan peristiwa keuangan lainnya.	Ordinal	5
			Mewujudkan simpulan yang berbeda.	Ordinal	6
			Informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.	Ordinal	7
		Dapat Dibandingkan	Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	Ordinal	8
			Dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.	Ordinal	9
		Dapat dipahami	Informasi dapat dipahami dengan jelas.	Ordinal	10
			Disajikan dalam bentuk dan 5 istilah yang sesuai dengan pemahaman pengguna.	Ordinal	11

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono., 2016). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah staff keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah 47 Perangkat Daerah yang meliputi dinas, badan, dan kantor di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 3. 2 Populasi Penelitian

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Dinas Perhubungan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan dan Pemukiman

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Dinas Kesehatan
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
9	Dinas Perikanan dan Peternakan
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15	Dinas Lingkungan Hidup
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17	Dinas Sosial
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20	Dinas Pendidikan
21	Inspektorat Daerah
22	Sekretariat DPRD
23	Sekretaris Daerah
24	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
26	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
27	Badan Narkotika Nasional
28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
32	Kecamatan Sindangkerta
33	Kecamatan Saguling
34	Kecamatan Rongga
35	Kecamatan Parongpong
36	Kecamatan Padalarang
37	Kecamatan Ngamprah
38	Kecamatan Lembang
39	Kecamatan Cisarua
40	Kecamatan Gununghalu
41	Kecamatan Cipongkor
42	Kecamatan Cipatat
43	Kecamatan Cililin
44	Kecamatan Cikalong Wetan

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat
45	Kecamatan Cihampelas
46	Kecamatan Batujajar
47	Kecamatan Cipeundeuy

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono., 2016). Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016) Teknik *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh dinas yang berada di Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah dua puluh dinas. Dimana variabel mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Kualitas Laporan Keuangan yang menjadi responden yaitu pada Bagian Keuangan tepatnya PPK-SKPD. Sedangkan yang menjadi responden mengenai *Good governance* yaitu Kepala Dinas. Sehingga setiap sampel terdiri dari dua responden.

Adapun alasan atau kriteria/ karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas : yang mana salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan penata kelolaan dalam melaksanakan urusan pemerintahan.
2. PPK-SKPD : pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada SKPD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13, Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) dapat diartikan Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

Dipilihnya responden di atas, karena mereka memiliki tugas dan tanggungjawabnya dalam jabatannya yang dapat memahami penerapan SAKD, *good governance*, dan kualitas laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya berikut sampel responden pada satuan kerja perangkat daerah pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 3. 3 Sampel Penelitian

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Dinas Perhubungan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat
4	Dinas Perumahan dan Pemukiman
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Dinas Kesehatan
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
9	Dinas Perikanan dan Peternakan
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15	Dinas Lingkungan Hidup
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17	Dinas Sosial
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20	Dinas Pendidikan

3.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban responden atas instrumen penelitian pada kuisioner yang berhubungan dengan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan penerapan *Good governance*. data ini dikumpulkan dengan cara mengirim kuesioner ke responden secara langsung. Kuesioner didistribusikan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat.

Langkah Selanjutnya data yang telah diklasifikasikan diolah ke dalam rumus statistik yang digunakan sesuai dengan rencana analisis untuk pengukuran atas variabel yang dikorelasikan. Hasil data yang telah diolah lanjut dianalisis diperoleh implikasi terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian.

Responden dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu bagian dari keuangan suatu instansi, responden dari variabel Penerapan *Good governance* yaitu Kepala Dinas dimana penelitian dilakukan, dan responden untuk variabel Kualitas laporan keuangan yaitu Bagian Keuangan dari suatu instansi.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2008). Statistik deskriptif melibatkan transformasi data mentah menjadi bentuk yang akan memberikan informasi untuk menggambarkan serangkaian faktor dalam suatu situasi.

3.5.2 Uji Kualitas Data

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan tingkat keandalan atau ketepatan suatu alat ukur. Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Untuk mencari validitas, harus mengkorelasikan skor dari setiap pertanyaan dengan skor total seluruh pertanyaan. Jika memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 maka dinyatakan valid, tetapi jika koefisien korelasinya dibawah 0,3 maka dinyatakan tidak valid. Dalam mencari nilai korelasi, maka penulis menggunakan rumus *Pearson Product Moment*, sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N(\sum X^2) - (\sum X)^2][N(\sum Y)^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

- r_{xy} = Koefisien Korelasi
- N = Jumlah Responden
- X = Skor Salah Satu Pertanyaan
- Y = Total Skor Pertanyaan

Angka yang diperoleh harus dibandingkan dengan standar korelasi validitas. Menurut Sugiyono (2017) nilai dari validitas adalah sebesar 0,3, Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada nilai standar pertanyaan tersebut valid (signifikan).

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data yang digunakan konsisten dalam mengungkapkan fenomena tertentu dari sekelompok individu meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas ialah teknik Cronbach's Alpha. Pengujian reliabilitas dengan teknik Cronbach's Alpha ini dihitung dengan rumus :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k - 1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan :

- r_{11} = Reabilitas yang dicari
- k = Jumlah item pertanyaan yang diuji
- $\sum \sigma_b^2$ = Jumlah Varians skor tiap item
- $\sum \sigma_t^2$ = Varians total

3.5.3 Uji Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2019) Uji asumsi Klasik berfungsi untuk menguji kelayakan data yang mendukung penelitian memastikan data yang diteliti tidak bias, konsisten, dan efisien. Uji asumsi klasik sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Pengujian asumsi klasik meliputi:

3.5.3.1 Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2019), Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji Normalitas merupakan persyaratan yang penting dalam pengujian kebermaknaan (signifikansi) Koefisien Regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Menurut Singgih Santoso (2002), dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu:

- Jika Probabilitas >0,05, maka distribusi dari populasi adalah normal
- Jika probabilitas <0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal.

Menurut Singgih Santoso (2002), Pengujian visual dapat dilakukan dengan metode gambar normal probability plots dalam program SPSS dasar pengambilan keputusan:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

-Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selain itu, untuk mengetahui bahwa data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji untuk menguji kenormalan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan samepl ini akan diuji hipotesis nol bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal melawan hipotesis tandingan bahwa populasi berdistribusi tidak normal.

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas (Priyatno, 2010).

Multikolinariaritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat Korelasi yang kuat diantara semua variabel maka independen konsekuensinya adalah:

- Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
- nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

Semakin besar korelasi diantara sesama variabel independen. maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar sehingga mengakibatkan standar errornya semakin besar pula. cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF) dengan rumus sebagai berikut.

$$VIF = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

(Ghozali, 2006).

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Priyatno (2010) Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi dengan prasyarat yang harus terpenuhi yaitu tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas yaitu melihat ada tidaknya pola pada grafik scatterplot, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya yang telah di studentized) dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik—titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Koefisien Determinasi (Kd)

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) maka digunakan analisis koefisien determinasi yaitu kuadrat nilai korelasi dikalikan 100%.

Rumus Koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

$$Kd = (r)^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r = Koefisien korelasi

Langkah terakhir adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis linear regresi berganda. Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

3.5.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, uji analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Jika dimasukkan dalam formulasi regresi linear berganda, maka akan diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

a = Konstanta

X_1 = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X ₂	= Penerapan <i>Good governance</i>
B ₁ , B ₂	= Koefisien Regresi
e	= Faktor pengganggu

3.6 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis akan dimulai dengan penetapan hipotesis operasional, penetapan tingkat signifikansi, uji signifikansi, kriteria dan penarikan kesimpulan.

a. Secara Parsial

H₁ : $p = 0$ Berarti tidak ada pengaruh signifikan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan

H_a : $p \neq 0$ Berarti ada pengaruh signifikan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan

H₂ : $p = 0$ Berarti tidak ada pengaruh signifikan penerapan *Good governance* terhadap kualitas laporan keuangan

H_a : $p \neq 0$ Berarti ada pengaruh signifikan penerapan *Good governance* terhadap kualitas laporan keuangan

Keterangan:

R = Koefisien Korelasi Regresi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Derajat kebebasan korelasi ganda adalah $df = (n-k-1)$.